

HARIAN

LENTERA

Inspirasi⁺Perubahan **TODAY**

EDISI SELASA, 18 JUNI 2024



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

[@lenteratoday](https://www.instagram.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.twitter.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.tiktok.com/@lenteratoday)

[f lentera.tv](https://www.facebook.com/lentera.tv)

[Lentera TV Media](https://www.youtube.com/LenteraTVMedia)

BERKELIT-KELIT SOAL BANSOS UNTUK KORBAN JUDI ONLINE

Rencana pemerintah untuk menjadikan korban judi daring atau online sebagai penerima bantuan sosial (bansos) panen kritik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sendiri telah meluruskan penjelasannya. Muhajir menegaskan bila pelaku tetal ditindak secara hukum, sementara bansos yang dimaksud akan diberikan ke anggota keluarga seperti anak istri/suami. Namun publik menilai apapun formulanya, kebijakan itu malah akan membuat penjudi 'tuman' alias gemar karena kebiasaan mendapat enak. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memilih melempar ke Kementerian Sosial (Kemensos) agar dihitung manfaat dan mudaratnya. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, bansos untuk judi online tidak ada dalam anggaran maupun rencana anggaran pemerintah. Rakyat menunggu 'taji' Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online.

JERATAN HUKUM UNTUK PELAKU JUDI ONLINE

Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 303: Mengatur tentang perjudian secara umum, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda Rp10 juta.

Pasal 303 bis ayat (1): Menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam judi, dengan ancaman hukuman yang sama seperti Pasal 303.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya

Pasal 27 ayat (2): Melarang distribusi, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian.

Pasal 45 ayat (2): Mengatur sanksi bagi pelanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

Baca di hal 11....



**Government (Hal.2)
Disoroti!
Kuota Tambahan
Haji Reguler
Dialihkan ke
ONH Plus**

Disoroti! Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus

JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mempertanyakan separuh dari 20 ribu kuota tambahan haji reguler yang oleh Kementerian Agama (Kemenag) dialihkan ke Ongkos Naik Haji (ONH) Plus. DPR menilai pengalihan itu tidak sesuai dengan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Haji.

Anggota Timwas Haji DPR John Kenedy Azis dalam keterangan tertulisnya mengatakan Indonesia telah mendapatkan tambahan 20 ribu kuota haji jauh sebelum Panja Haji dibentuk.

"Panja Haji juga dibuat setelah kita mendapat informasi ada tambahan kuota sebesar 20 ribu," kata John di Makkah, Arab Saudi, dikutip Senin (17/4/2024).

Dia menyebutkan kuota tambahan itu diumumkan oleh pemerintah melalui Kemenag dan diharapkan dapat mempercepat keberangkatan jamaah calon haji yang telah menunggu bertahun-tahun.

"(Dengan) tambahan kuota haji itu, kita berharap komposisi antara jamaah haji reguler dan ONH Plus ada 8 persen pembagian, itu undang-undang yang menyatakan demikian," tuturnya.

Namun, ujar John, separuh dari kuota tambahan tersebut ternyata dialihkan ke ONH Plus. Menurut dia, tidak pernah ada pembahasan mengenai pengalihan kuota tambahan untuk ONH Plus saat Panja Haji dibahas hingga diputuskan.

"Saat Panja dibahas sampai diputuskan dan Panja melaporkan hasil Panja kepada Komisi VIII, sama sekali tidak ada dibahas tentang tambahan kuota 20 ribu itu diambil dan diserahkan ke ONH Plus," ucap John.

Dia menjelaskan, pada rapat terakhir Komisi VIII dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag melaporkan kuota 20 ribu tersebut dialihkan ke ONH Plus. "Tentu saya menanyakan di situ, apa dasar hukumnya pengalihan itu? Karena itu adalah hak jamaah haji reguler," ujar John.

John juga menyoroti sekitar 19 ribu kuota tambahan diberikan kepada ONH Plus. "Dari 17.240 ribu sekian, kemudian tiba-tiba menjadi 19.250, berarti yang 20 ribu itu dibagi begitu saja? Diserahkan ke ONH Plus," kata dia menengaskannya.

Karena itu, Timwas Haji DPR meminta penjelasan resmi dari Kemenag mengenai dasar hukum pengalihan kuota tersebut, mengingat kuota tambahan itu seharusnya menjadi hak jamaah haji reguler.

"Di sisi lain, tidak ada ketika bahasan Panja Haji permasalahan itu disampaikan kepada kita, kenapa sekarang tiba-tiba dialihkan tambahan



Jamaah akan melontar Jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, dilanjutkan jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada hari-hari Tasyrik yakni 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. (Ist)

kuota itu kepada haji reguler, di situlah saya melaporkannya," ujarnya.

Cak Imin Sebut AC Mati

Ketua Tim Pengawas (Timwas) DPR RI Muhaimin Iskandar mengaku menerima banyak laporan atas penyelenggaraan jamaah haji Indonesia. Cak Imin, panggilan akrabnya, menyebut salah satunya adalah laporan terkait air conditioner (AC) yang tidak berfungsi.

"Ada banyak laporan yang masuk, yang pertama matinya AC di mana-mana," kata Cak Imin kepada wartawan di Mina, Arab Saudi, dikutip Senin (17/4/2024).

Selain itu, masalah lainnya berhubungan dengan tenda jamaah hari RI. Menurut Cak Imin, tenda jamaah haji RI melebihi kapasitas.

"Kemudian overcapacity tendanya, tidak ada kasur. Ini semua harus dikalkulasikan," ujarnya.

Adapun Timwas Haji DPR sekarang masih terus melakukan pemantauan pelaksanaan haji 2024 yang saat ini sudah pada tahap melempar jumrah aqabah di Mina. Sampai saat ini, tidak ada laporan adanya jamaah yang meninggal dunia dalam rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan ada keterlambatan transportasi bus yang membawa jamaah haji dari pemondokan ke Arafah. Pengantaran jamaah yang dijadwalkan pagi hari terlambat hingga siang dan sore hari.

Untuk itu, Timwas DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi temuan-temuan tersebut.

Jamaah haji mulai melaksanakan lempar jumrah setelah selesai mengerjakan wukuf di Arafah dan mabit atau menetap di Muzdalifah. Jadwal lempar jumrah telah

ditetapkan, jamaah haji Indonesia diimbau untuk melempar jumrah sesuai jadwal.

Untuk diketahui, operasional penyelenggaraan ibadah haji hari ini, Senin 17 Juni 2024 telah memasuki hari ke-37. Ini sebagaimana diungkapkan Widi Dwinanda, Tim Media Center Kementerian Agama, dalam siaran pers yang ditayangkan secara live di YouTube Kemenag.

"Saat ini seluruh jamaah tengah menjalani fase puncak haji yaitu bermalam di Mina dan melontar jumrah. Hari ini, tanggal 11 Zulhijjah 1445 Hijriyah adalah hari kedua para jamaah haji berada di Mina kemudian jamaah haji bersiap melakukan lontar jumrah. Jamaah akan melempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah," kata Widi, dikutip detikHikmah.

Widi melanjutkan, jadwal lontar jumrah yang telah ditetapkan oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tanggal 11 Zulhijjah jamaah dapat melakukan lontar jumrah pada pukul 05.00 sampai 11.00 Waktu Arab

Saudi (WAS), kemudian pukul 11.00 sampai 17.00 WAS dan pukul 17.00 sampai 00.00 WAS.

Jamaah bisa menyesuaikan waktu lontar pada saat sore hari atau malam dengan pertimbangan kondisi cuaca tidak panas atau lebih sejuk.

Kawal Pergerakan Jamaah Haji

Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Anggota Timwas Haji Ashabul Kahfi mengingatkan kepada panitia atau petugas ibadah haji 2024 agar mengawal dan mengawasi setiap pergerakan jamaah haji dari Indonesia, dari satu tempat ke tempat yang lain.

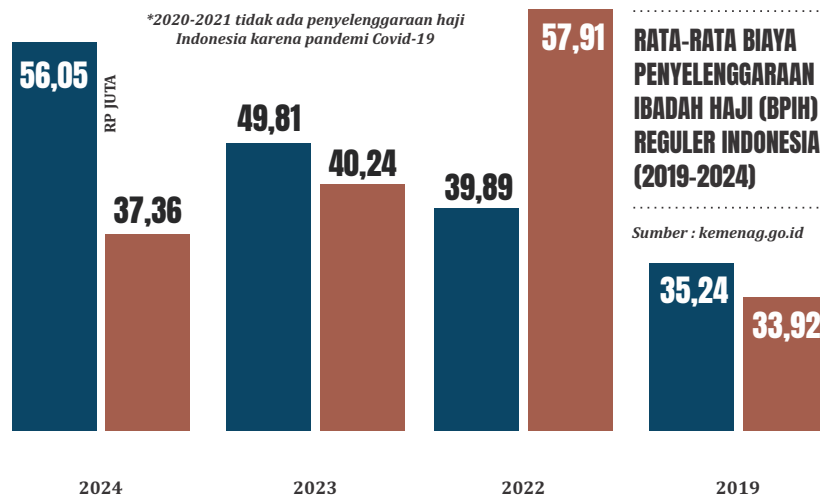
Menurutnya, pengawasan khusus selama pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan hingga ke Mina merupakan hal penting, karena dia berharap tragedi Muzdalifah yang terjadi tahun lalu tidak terulang kembali.

"Saya meminta agar pendorongan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah hingga ke Mina menjadi pantauan kita bersama," kata Ashabul dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (17/6/2024).

Dia juga menekankan agar para petugas haji mengawasi ketat pergerakan jamaah dari tenda Mina menuju Jamarat untuk menghindari insiden jamaah hilang atau salah jalur. Dia pun memastikan pihaknya melalui Timwas Haji DPR terus memantau persiapan dan pelaksanaan ibadah haji guna memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah haji Indonesia.

Dengan begitu, dia berharap jamaah haji Indonesia melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan tuntas hingga mendapatkan manfaat atas pelaksanaan ibadah tersebut.

"Kita berharap jamaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan sempurna hingga mendapatkan predikat haji mabrur," tuturnya. (eid,rls,ant/dya).



RUU PPRT 20 Tahun 'Digantung', DPR Didesak Sahkan Sebelum Akhir 2024

JAKARTA-DPR RI diminta mempercepat pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Diketahui, RUU ini telah memasuki 20 tahun berproses di Senayan.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini mengungkapkan, situasi hidup dan kerja PRT di Indonesia saat ini, sama sekali tidak mencerminkan PRT diakui sebagai pekerja dan care worker. "Ini bisa dilihat dari banyaknya persoalan yang dialami PRT seperti upah tidak dibayar, sulit mendapatkan jaminan kesehatan dan tenaga kerja," kata Lita, dalam keterangannya Senin (17/6/2024).

Sebagai informasi, Tltanggal 16 Juni 2024 diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional atau International Domestic Workers Day (IDWD) di seluruh dunia.

Berdasarkan Rapid Assessment oleh JALA PRT, jumlah PRT diperkirakan mencapai 16.117.331 orang. Berdasarkan survei International Labour Organisation (ILO) pada 2015, terdapat 4,5 juta PRT lokal yang bekerja di dalam negeri.

Dalam hal upah, PRT masih jauh dari perlindungan, dengan upah di berbagai kota besar seperti Medan, Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar hanya berkisar 20-30 persen dari UMR.

Mayoritas PRT hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak bisa mengakses perlindungan sosial dan hak dasar ketenagakerjaan.

Pemetaan oleh JALA PRT pada 2024 menunjukkan PRT di Indonesia masih mengalami empat jenis



Kelompok sipil yang mendesak pengesahan RUU PPRT menggelar aksi menjemur poster. (dok.ist)

kekerasan dan intimidasi kerja, mulai dari bekerja dalam situasi perbudakan. Selain itu, hidup dalam situasi pelecehan, hidup dalam kemiskinan karena dikesualikan dari perlindungan sosial, dan rentan menjadi korban trafficking.

Sebelumnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyerukan halsenada.

"Perjuangan ini telah memasuki dua dekade berproses di DPR RI," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar bertajuk "Mendorong DPR RI Membahas RUU PPRT di Akhir Periode Kerja 2019-2024", di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Menurut dia, berbagai upaya telah

dilakukan oleh ormas perempuan bersama masyarakat sipil dan pemerintah untuk mendorong agar RUU PPRT segera disahkan.

Dikatakannya, tahun 2024 menjadi titik kritis pembahasan RUU PPRT karena jika pada tahun ini tidak ada yang dibahas dan disepakati dalam pembahasan tingkat I DPR RI, maka RUU PPRT akan menjadi non-carry over. Pihaknya berharap di masa periode kerja DPR RI 2019 - 2024, RUU ini dapat disahkan menjadi undang-undang.

"Atau setidaknya ada pembahasan salah satu pasal agar RUU PPRT ini menjadi carry over untuk diperjuangkan pengesahannya menjadi undang-undang pada periode 2024 - 2029," kata Olivia Salampessy.

Diminta Tanya Ketua DPR

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menuturkan Komnas Perempuan bisa menemui pimpinan DPR untuk memastikan apakah RUU PPRT dapat dibahas dengan pemerintah secepatnya atau tidak.

Luluk menyebut pimpinan DPR harus segera menentukan pembahasan RUU PPRT akan dilakukan sebelum periode 2029-2024 berakhir.

Pasalnya, kata Luluk, secara teknis masih sangat memungkinkan, dan jika pun Badan Legislasi (Baleg) yang ditugaskan, maka pihaknya mengaku sangat siap.

"Hanya saja secara politis, maka pimpinan DPR yang harus menjawab," ujar Luluk kepada Media Indonesia, Minggu (16/6).

"Ini kepentingan apa atau siapa yang membuat RUU ini gak keluarkan hingga 20 tahun," tegas Luluk.

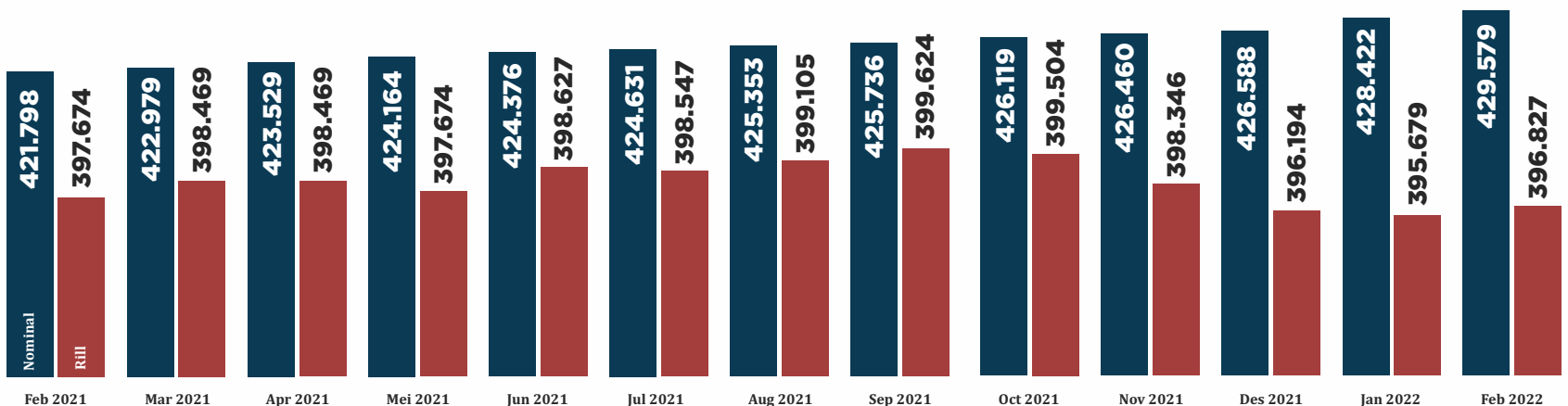
Luluk menyebut di Baleg sudah diambil keputusan dan meminta pimpinan agar segera ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Namun hingga tahun kedua, RUU ini masih mangkrak dan tak kunjung dibawa ke Rapat Paripurna.

Menurut Luluk, butuh political will yang kuat untuk menuntaskan RUU jadi UU PPRT. Intinya, kata Luluk, Komnas Perempuan harus segera menemui ketua DPR RI Puan Maharani.

"Segera minta penjelasan langsung, Komnas kan lembaga pemerintah bukan NGO. Harus ada cara advokasi yang berbeda saya kira," papar Luluk. (wid,rls,ist,ant/dya)

RATA-RATA UPAH NOMINAL DAN RIIL ASISTEN RUMAH TANGGA (FEBRUARI 2022)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)



Pemilu 2024 Belum Usai, Ada Coblosan Ulang Akhir Juni dan Juli

JAKARTA-Pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 belum seluruhnya selesai dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih harus melakukan coblosan alias pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) atas perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota KPU RI Idham Holik menyebut, PSU akan diselenggarakan sebanyak tiga kali pada hari Sabtu, yakni pada tanggal 22 dan 29 Juni serta 13 Juli. "Sabtu, 22 Juni 2024 untuk 2 putusan MK, Sabtu, 29 Juni 2024 untuk 11 putusan MK, dan Sabtu, 13 Juli 2024 untuk 6 putusan MK," katanya lewat keterangan tertulis, dikutip Senin (17/6/2024).

Menurut Idham, detail daerah yang menggelar PSU pada tanggal-tanggal tersebut masih harus menunggu terbitnya Keputusan KPU. KPU sendiri sudah menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tindak lanjut mengenai amar putusan MK atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 pada Rabu (12/6/2024) sampai Jumat (14/6/2024). MK mengeluarkan 20 putusan dengan amar yang memerintahkan KPU untuk menggelar pemilu ulang, termasuk Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.

Dalam hal ini, seluruh pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan, serta daftar pemilih tetap di Sumatera Barat pada Pemilu 2024 Februari lalu harus mencoblos ulang. Namun, mereka hanya akan mencoblos satu surat suara saja, yakni DPD RI.

Berdasarkan putusan MK, durasi waktu yang diberikan kepada KPU untuk menindaklanjuti perintah PSU Pileg DPD Sumatera Barat adalah 45 hari.

Selain di Sumatera Barat, putusan MK terkait PSU dengan durasi 45 hari adalah Pileg DPRD Provinsi Gorontalo VI, DPRD Kota Tarakan I, DPRD Provinsi Riau III dan Kabupaten Rokan Hulu III, DPRD Kabupaten Jayawijaya IV, DPRD Kabupaten Jayawijaya IV, DPRD Papua Pegunungan I.

Untuk durasi waktu tindak lanjut 30 hari, PSU yang akan digelar yakni untuk Pileg DPRD Kabupaten Indragiri Hulu V, DPRD Kabupaten Meranti IV, DPRD Kota Dumai IV, DPR Papua Barat Daya III, DPRD Kabupaten Sintang V, DPRD Kabupaten Samosir I.

Lalu Pileg DPRD Kabupaten Nias Selatan VI, DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan II, DPRD Provinsi Jambi II, DPRD Kota Cirebon II (disertai penghitungan ulang surat suara), dan DPRD Kabupaten Cianjur III (disertai penghitungan ulang surat suara).

Sementara itu, ada dua perkara yang diputus MK dengan amar perintah ke KPU untuk menggelar PSU



Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (11/6/2024). ANTARA

dalam durasi waktu tindak lanjut 21 hari, yaitu Pileg DPRD Kabupaten Gorontalo II dan DPRD Kota Ternate II.

Selain PSU, Idham menyebut pihaknya telah menetapkan tanggal penghitungan ulang surat suara yang juga amanat dari putusan MK. "Rabu, 19 Juni 2024 untuk 5 putusan MK, Rabu, 26 Juni 2024 untuk 2 putusan MK, dan Sabtu, 06 Juli 2024 untuk 7 putusan MK," pungkasnya.

Bawaslu Awasi Kampanye

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal mencegah calon anggota legislatif berkampanye sebelum pencoblosan ulang Pemilu Legislatif 2024 dilakukan. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengelat pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah lokasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI Puadi mengatakan terhadap 44 putusan MK yang memerintahkan KPU untuk menggelar PSU, penghitungan suara ulang, maupun penyandingan suara, jajarannya akan bertugas sebagai pengawas sebagaimana yang dilakukan saat Pemilu 2024 pada Februari lalu.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu, sambungnya, melekat baik sebelum, saat, maupun setelah PSU berlangsung.

"Jangan sampai begitu pemungutan suara ulang ada yang berkampanye, ada yang melakukan politik uang. Maka kita harus melakukan upaya pengawasan yang sangat ketat dengan melakukan proses pencegahan, imbauan," terang Puadi, Senin (17/6/2024).

Larangan kegiatan kampanye pada PSU berdasarkan putusan MK termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat

Suara dalam Pemilihan Umum. Meski tanpa kampanye, KPU berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

KPU mengatakan akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menyosialisasikan PSU di berbagai kanal dan jaringan. Pihaknya juga akan memastikan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya.

"Berkenaan dengan rencana tindak lanjut putusan MK, tentunya kami harus memaksimalkan di waktu yang tersedia dengan berbagai kanal atau pun jaringan," ujar Anggota KPU RI Idham Holik.

"Kita pastikan pemilih yang berhak di dalam DPT sesuai amar putusan MK itu dapat menggunakan hak pilihnya dengan basis informasi yang cukup," tuturnya. Menurut dia, diseminasi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan kunci supaya para pemilih dapat ikut berpartisipasi dalam PSU mendatang.

Sebelumnya, MK telah selesai memutus 106 perkara PHPU Pileg 2024. Sidang pembacaan putusan itu digelar pada 6, 7, dan 10 Juni 2024. MK mengabulkan 44 perkara dan menolak 58 perkara PHPU Pileg 2024. Total keseluruhan perkara yang diregister MK sebanyak 297.

Dari 44 perkara tersebut, MK mengabulkan dengan beragam putusan, seperti pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK. Lebih lanjut, ada tiga perkara yang dikabulkan penarikannya dan 1 perkara tidak dapat diterima.

Jumlah 44 perkara yang dikabulkan meningkat tiga kali lipat atau sekitar 14,81 persen dibanding 2019. Saat PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 dari 261 perkara yang diregister atau sebanyak 4,59 persen. (qis,rls,ist,ant/dya)

BERIKUT DAFTAR PSU BERDASARKAN PUTUSAN MK:

DURASI WAKTU TINDAK LANJUT 45 HARI:

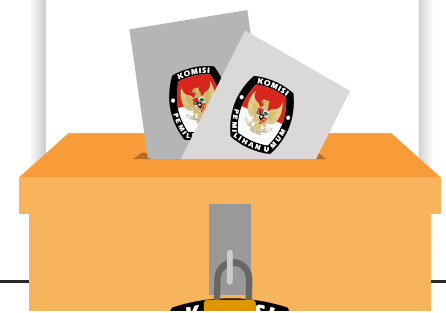
- DPRD Provinsi Gorontalo VI
- DPRD Kota Tarakan I
- DPRD Provinsi Riau III dan Kabupaten Rokan Hulu III
- DPRD Kabupaten Jayawijaya IV
- DPRD Kabupaten Jayawijaya IV
- DPRD Papua Pegunungan I
- DPD RI Sumatra Barat

DURASI WAKTU TINDAK LANJUT 30 HARI:

- DPRD Kabupaten Indragiri Hulu V
- DPRD Kabupaten Meranti IV
- DPRD Kota Dumai IV
- DPR Papua Barat Daya III
- DPRD Kabupaten Sintang V
- DPRD Kabupaten Samosir I
- DPRD Kabupaten Nias Selatan VI
- DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan II
- DPRD Provinsi Jambi II
- DPRD Kota Cirebon II (disertai penghitungan ulang surat suara)
- DPRD Kabupaten Cianjur III (disertai penghitungan ulang surat suara)

DURASI WAKTU TINDAK LANJUT 21 HARI:

- DPRD Kabupaten Gorontalo II
- DPRD Kota Ternate II



Dugaan Korupsi Timah Kejagung Telusuri Rumah Harvey Moeis di Australia

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri aset milik Harvey Moeis yang diduga bermasalah. Usai menyita tujuh mobil mewah diantaranya Ferrari, 360 Challenge Stradale, Ferrari 458 Speciale dan Mercedes-Benz SLS AMG, Kejagung tengah menelusuri kepemilikan rumah mewah Harvey Moeis di Australia.

Apalagi, belakangan tengah heboh soal rumah Harvey Moeis di Australia disewakan. Hal tersebut terungkap lewat unggahan akun X, @lanicolecky.

"Ngeliat iklan rumah Sandra Dewi dijadiin airbnb di Melbourne for \$3.5 k per night," tulis akun X @lanicolecky dikutip Senin (17/6/2024).

Unggahan ini ramai dibicarakan soal rumah pasangan itu dijadikan airbnb dengan biaya sewa sekitar Rp56,8 juta per malam.

Saat disinggung soal rumah tersebut, Harris Arthur Hedar, kuasa hukum Sandra Dewi pun memberikan penjelasan. Ia mengatakan jika rumah tersebut bukan milik Sandra Dewi dan Harvey Moeis.

"Kalau kita biasa dari keluar sewa rumah biar murah. Sebagai rumah pribadi nggak ada. Rumah sewa, iya, dalam jangka pendek selama di sana misalnya seminggu, dua minggu," jelas Harris Arthur Hedar, kuasa hukum Sandra Dewi dan Harvey Moeis saat ditemui di Kejaksaan Negeri Jakarta



Kejagung tengah menelusuri kepemilikan rumah mewah Harvey Moeis di Australia. (Dok)

Selatan, Kamis, (13/6/2024).

Harris juga mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Dewi Sandra saat ini baik-baik saja meski sebelumnya sempatsakit.

"Sebelumnya kan memang pernah sakit sebelum kasus ini. Saya kira siapa pun juga merasakan hal ini terhadap keluarga merasa sakit, tapi saat ini baik-baik saja," ujarnya. Seperti diketahui, Sandra Dewi turut diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi PT Timah yang menjerat suaminya. Selain terjerat kasus korupsi PT Timah, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka TPPU (tindak pidana pencucian uang).

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar menyebutkan, 30 Jaksa Penuntut Umum (JPU) disiapkan Kejaksaan Agung untuk menangani perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah periode 2025-2022.

Mereka akan menyusun dakwaan untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk kepentingan persidangan.

Harli Siregar menjelaskan, Jaksa tersebut disiapkan setelah berkas perkara dari 12 tersangka dinyatakan lengkap dan siap disidangkan.

"Ada sekitar 30 Jaksa yang akan

dilibatkan dalam perkara korupsi tersebut. Mereka adalah gabungan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Harli, kepada media, dikutip Minggu (16/6/2024).

Disebutkan, puluhan Jaksa tersebut nantinya juga akan diberikan pengamanan khusus hingga proses persidangan selesai.

"Terhadap Jaksa yang menangani perkara tersebut akan ada pengamanan khusus, meski hal itu sejak awal sudah kami lakukan ya," ungkapnya.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah yang menyebabkan total kerugian negara Rp300 Triliun.

Dugaan operasi ilegal di wilayah pertambangan PT Timah di Provinsi Bangka Belitung, mulai tahun 2015 hingga 2022

Mereka adalah Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Sementara berkas 12 tersangka telah dilimpahkan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan. (Wid,rls,ant/dya)

Dilarang Buang Limbah Rumen Hewan Kurban ke Kalimas Patroli Pemkot Surabaya Temukan Pelanggaran

SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan giat pengawasan susur sungai di sepanjang Kalimas, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Senin (17/6/2024). Pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya warga membuang limbah rumen dan kotoran hewan kurban ke sungai.

Giat pengawasan ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Nomor 600.4/ 17055/ 436.7.10/2024 tentang Sosialisasi Penyembelihan Hewan Kurban. Giat pengawasan susur sungai dilakukan mulai pukul 10.45 WIB, dari Dermaga Kalimas Ngagel Surabaya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto menyatakan, pemkot telah mengeluarkan surat edaran berupa imbauan agar warga tidak membuang limbah rumen hewan kurban ke sungai. Sebab, membuang limbah rumen sembarangan dapat mencemari lingkungan.

"Kami juga mengimbau agar rumen pada saat dibersihkan, ditaruh di glangsing dan silahkan dibuang ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) terdekat. Atau biasanya ditimbun di

tanah bisa jadi kompos juga," kata Dedik usai giat sisir sungai di Dermaga Ngagel Surabaya.

Selain itu, Dedik menerangkan bahwa Pemkot Surabaya juga mengharapkan warga tidak menggunakan plastik sekali pakai saat membagikan daging hewan kurban. Imbauan tersebut sebelumnya juga tercantum ke dalam surat edaran.

"Nanti kita tinjau juga di tempat-tempat pemotongan. Pembagiannya kami harapkan tidak menggunakan plastik sekali pakai atau tas kresek. Kalau bisa pembagiannya pakai besek," ujarnya.

Dalam giat susur sungai kali ini, Dedik mengungkapkan jika petugas menemukan beberapa titik lokasi warga yang mencuci daging hewan kurban di Sungai Kalimas. Petugas pun memberikan karung atau glangsing sekaligus imbauan agar warga tidak turut membuang kotoran dan limbah rumen ke sungai.

"Memang ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencuci jeroan sapi hasil penyembelihan kurban. Kami lihat masyarakat ada yang patuh, jadi



Petugas susur sungai di sepanjang Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Senin (17/6/2024). (Ist)

dia kotorannya ditaruh di glangsing, dibuang ke TPS, kemudian di sungai mencuci sisa-sisa kotoran," ungkap dia.

Namun demikian, di antara beberapa warga tersebut, masih saja ada yang turut membuang kotoran hewan kurban ke sungai. Petugas pun kembali mengingatkan mereka agar memisahkan kotoran hewan kurban

dan ditaruh ke dalam glangsing.

"Di Sungai (Kalimas) Ngagel, kurang lebih ada sembilan titik yang kita temui. Tadi ada satu yang pada saat kita sidak itu mereka pas buang, tapi memang kayaknya itu babat, bukan isi perut, mereka pas cuci kotorannya juga ada di situ sekalian dibuang," katanya. (ama,rls/dya)

Ditarget Capai Rp 1,2 T di 2024, DPRD Kota Malang Minta Pemkot Genjot Realisasi PAD



GOR Ken Arok menjadi salah satu penyumbang PAD Kota Malang (Dok. Istimewa)

MALANG - DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan membidik target APBD 2024 yang cukup ambisius, yakni sebesar Rp 1,2 triliun. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi PAD APBD tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 970 miliar.

Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrochman, mengatakan selama tiga tahun terakhir, capaian PAD Kota Malang memang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, PAD mencapai Rp 430 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 566 miliar pada tahun 2022, dan Rp 792 miliar pada tahun 2023.

Meskipun ada peningkatan

signifikan setiap tahunnya, menurutnya total capaian tersebut masih belum mencapai angka Rp 1 triliun.

"Berdasarkan kajian dewan, PAD Kota Malang sebenarnya memiliki potensi untuk mencapai Rp 3 triliun. Potensi ini bisa dicapai jika beberapa jenis pajak yang selama ini dilimpahkan ke provinsi dikembalikan ke pemerintah kota, seperti pajak kendaraan bermotor," ujar Abdurrochman, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Senin (17/6/2024).

Namun, hingga saat ini, politisi PKB ini menyebutkan, pajak-pajak tersebut belum dilimpahkan. Oleh karena itu, sambungnya, dewan meminta Pemkot Malang untuk memaksimalkan potensi PAD yang ada.

"Fokus utama adalah pada pajak daerah yang memiliki target paling tinggi, serta retribusi daerah," ungkapnya. Untuk tahun ini, pria yang akrab dengan sapaan Abah Dur tersebut menjelaskan, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 806 miliar, sementara target retribusi berada di angka Rp 56 miliar.

"Tahun kemarin PAD tidak mencapai Rp 1 triliun. Harapan kami

tahun ini ada peningkatan signifikan hingga mencapai Rp 1,2 triliun," jelasnya.

Ditegaskannya, bahwa peningkatan PAD sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan Kota Malang. Terutama untuk sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan jaminan kesehatan masyarakat. "Selain pajak dan retribusi, Pemkot bisa mengandalkan pendapatan dari sewa aset," sambungnya.

Menurutnya, skema sewa aset perlu diperbaiki agar pendapatan dapat lebih optimal. Ia mencatat, sewa aset seringkali jauh lebih murah dibanding harga sewa umum, hanya sekitar 20 persen dari harga pasar. "Setidaknya nilai sewa bisa mencapai 50 persen dari harga umum, agar pendapatan sewa bisa dikelola untuk kepentingan masyarakat," jelas Abah Dur.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan bahwa realisasi PAD yang mencapai Rp 1 triliun kemungkinan besar baru akan tercapai pada tahun 2025. Menurut Wahyu, hal ini dikarenakan adanya tambahan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang diharapkan akan dilimpahkan kembali ke pemerintah kota. (Santi/Dya)

Belajar dari Pemilu Februari, Bawaslu Malang Gaungkan Tolak Politik Uang di Pilkada

MALANG - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Februari 2024 lalu, meninggalkan pelajaran penting bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang. Salah satunya terkait politik uang.

Bawaslu berjanji memperketat pengawasan dan menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik money politic di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung November 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Wahyudi, mengungkapkan kasus politik uang yang marak terjadi pada Pemilu 2024 menjadi cermin untuk perbaikan sistem pengawasan pemilu.

"Pemilu Februari 2024 memberikan banyak pelajaran berharga. Kami di Bawaslu Kabupaten Malang bertekad untuk menjadikan Pilkada November 2024 bersih dari praktik politik uang," ujar Wahyudi, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Senin (17/6/2024).

Selama Pemilu 2024, Wahyudi menyebutkan, Bawaslu Kabupaten Malang menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus politik uang. Salah satu kendala utama yaitu para

saksi yang memilih kabur ketika dimintai keterangan.

"Saat kami mencoba menangani dugaan kasus politik uang, para saksi lari tidak bersedia memberikan kesaksian dan memilih untuk menghilang," jelasnya.

Meskipun demikian, Wahyu mengklaim bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah berupaya untuk menelusuri dan mengidentifikasi terduga pelaku politik uang. Dalam beberapa kasus, ia mengatakan telah berhasil menemukan individu-individu yang diduga terlibat, namun sering kali sulit untuk mendapatkan bukti yang cukup kuat karena minimnya kesaksian.

Diketahui, kasus dugaan politik uang sempat viral pada Pemilu 2024 lalu. Di mana dalam prakteknya, terdapat dugaan pemberian uang untuk mencoblos salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, menjadi salah satu kasus yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Malang.

Lebih lanjut, untuk Pilkada 27 November 2024 mendatang, Wahyudi menegaskan, Bawaslu Kabupaten Malang berkomitmen untuk

meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Pihaknya menyampaikan akan memperkuat koordinasi dengan jajaran Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. "Kami mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan politik uang yang terjadi," tambah Wahyudi.

Dalam kesempatan ini, Wahyudi juga menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Malang akan melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan para calon untuk menolak dan menghindari politik uang. Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada dapat berkompetisi secara sehat dan jujur.

"Kami berharap, dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, Pilkada November 2024 bisa berjalan dengan lebih bersih dan



Ketua Bawaslu Kota Malang, M Wahyudi. (Santi/Lenteratoday)

adil," serunya.

Tak hanya itu, menurutnya Bawaslu juga akan memperkuat pengawasan di lapangan dengan meningkatkan jumlah petugas pengawas dan memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas kampanye. "Mereka juga akan bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memastikan setiap laporan dugaan politik uang dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat," tukasnya. (Santi/Dya)

DANIEL RADCLIFFE

Raih "Tony Awards" perdana

BINTANG drama musikal "Merrily We Roll Along" Daniel Radcliffe meraih Tony Awards perdana. Itu juga merupakan nominasi pertamanya, menurut Variety.

"Pada Tony Awards tahunan ke-77, Daniel Radcliffe memenangkan penghargaan untuk penampilan terbaik oleh aktor unggulan dalam musikal untuk perannya sebagai Charley Kringas, penulis lirik dan sahabat Franklin Shepard (diperankan oleh Jonathan Groff)," demikian laporan tersebut dilansir di Jakarta, Senin.

Tony Awards merupakan penghargaan teater Amerika yang diberikan The American Theatre Wing dan The League of American Theatres and Producers untuk karya-karya produksi dan penampilan di Broadway.

Kepada wartawan, Radcliffe cukup terkesan dengan penghargaan tersebut. Dia bilang meski sudah mulai melakukan beberapa hal di panggung seni peran, dia sendiri tidak tahu akan memperoleh itu pada karirnya setelah film Harry Potter berakhir.

"Memainkan satu karakter dalam waktu yang sangat lama akan menimbulkan kecemasan. Aku seperti mendorong diri untuk melakukan hal lain sebanyak mungkin. Jadi ya, aku sedang melakukan itu sekarang," kata Radcliffe. Radcliffe telah menjadi peran utama dalam delapan judul film Harry Potter sejak seri pertama "Sorcerer's Stone (2001)" hingga yang terakhir "The Deathly Hallows Part 2 (2011)".

Setahun terakhir, dia berperan dalam "Weird: The Al Yankovic Story (2022)" dan "Merrily We Roll Along (2023)".

Keduanya pun akan meninggalkan kesan yang luar biasa pada aktor yang dijuluki "The Boy Who Lived".

Apalagi Radcliffe kemudian merayakan kelahiran putranya bersama sang kekasih Erin Darke pada April 2023. (nei,ist/dya)

“

Memainkan satu karakter dalam waktu yang sangat lama akan menimbulkan kecemasan. Aku seperti mendorong diri untuk melakukan hal lain sebanyak mungkin. Jadi ya, aku sedang melakukan itu sekarang,”





DOKTER KULIT: KONSUMSI DAGING KAMBING TAK SEBABKAN MASALAH KULIT

DOKTER spesialis kulit di RSUD Kebayoran Baru dr. Erika Nurhandayani, Sp.DV mengatakan konsumsi daging kambing atau domba yang umumnya marak pada Hari Raya Idul Adha, tak menyebabkan masalah pada kulit asalkan porsinya tak berlebihan.

"Kalau dagingnya dalam porsi normal tidak (menyebabkan masalah kulit). Untuk dagingnya, asal jumlahnya tidak berlebihan, Insyaallah aman buat kulit," kata dia dalam acara daring yang diadakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Merujuk Kementerian Kesehatan, masyarakat sebaiknya menetapkan ukuran porsi yang seimbang dengan memperhatikan kebutuhan gizi tubuh dan rekomendasi asupan harian, dan ini berlaku untuk daging kambing atau domba.

Erika lalu mengingatkan cara memasak daging yakni dengan digoreng dan penambahan bahan seperti santan yang berpotensi memicu masalah kulit. Adapun konsumsi santan berlebihan diketahui bisa meningkatkan risiko munculnya jerawat.

Santan dapat meningkatkan kadar minyak alami pada kulit wajah yang dapat menimbulkan komedo, menyumbat pori-pori kulit, hingga memicu munculnya jerawat.

"Biasanya cara memasaknya dengan santan dan bumbu-bumbu lainnya, digoreng-goreng, minyak-

minyak, itu salah satu yang memicu masalah kulit," kata Erika.

Adapun jerawat menjadi masalah kulit yang sering dialami orang-orang baik usia remaja hingga 40 tahun ke atas.

Penyebab masalah ini bisa berasal dari dalam tubuh yakni terkait hormonal dan genetik, serta faktor luar seperti penggunaan produk perawatan kulit yang tak sesuai menyebabkan tersumbatnya pori-pori dan memicu jerawat.

"Asupan makanan yang tidak sesuai. Banyak makanan instan yang manis dan indeks glikemik tinggi, salah satu yang memicu jerawat," kata Erika yang menambahkan penyebab lain munculnya jerawat juga meliputi paparan sinar matahari yang berlebihan dan polusi udara.

RISIKO PENYAKIT

Selain membatasi jumlah daging yang dikonsumsi, cara mengolah dan memasak makanan ini juga harus diperhatikan.

Ada beberapa hal penting serta tips agar tetap nyaman konsumsi daging kambing, di antaranya:

1. Porsi yang Pas

Berlebihan mengonsumsi makanan ini disebut bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Maka dari itu, penting untuk mengetahui porsi

yang pas. Agar terhindar dari risiko penyakit, konsumsi daging kambing atau daging merah lainnya disarankan sebanyak 1-2 porsi dalam seminggu. Pastikan juga untuk memilih daging yang segar dan bersih.

2. Perbandingan Nutrisi

Mengonsumsi makanan ini memang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, bukan berarti harus dikonsumsi secara berlebihan. Biar tubuh tetap nyaman dan tidak memicu penyakit, penting untuk mengetahui perbandingan nutrisi makanan, sehingga tidak dikonsumsi secara berlebihan.

Dalam 100 gram daging kambing matang terdapat 75 mg kolesterol. Namun, jumlah ini cenderung lebih sedikit dibandingkan dada ayam (85 mg kolesterol) dan daging sapi sirloin (90 mg kolesterol).

3. Mengolah dengan Tepat

Penting juga untuk mengetahui cara mengolah dan memasak daging dengan tepat. Jangan menggoreng kambing, sebab proses masak ini bisa menambahkan kadar lemak pada daging.

Sebagai gantinya, cobalah untuk mengolah daging dengan cara dibakar, dipanggang, disatai, atau dibuat sup. Pastikan juga untuk membuang lemak pada daging sebelum mengolahnya.

4. Lengkapi dengan Sayuran

Jika tujuannya untuk menyantap daging kambing tanpa takut kolesterol naik, coba barengi dengan konsumsi sayuran dan buah. Selain baik untuk mencukupi asupan serat, jenis makanan ini juga bisa melancarkan pencernaan dan mengurangi penyerapan kolesterol dari daging (Antara/halodoc)



ACER PERKENALKAN MONITOR PINTAR ANYAR DA1 DAN NITRO GA1

PERUSAHAAN teknologi, Acer, secara resmi meluncurkan jajaran monitor pintar serbaguna terbarunya yaitu seri Acer DA1 dan seri Nitro GA1 dirancang untuk menghadirkan pengalaman sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup yang beragam.

Monitor seri Acer DA1 dan seri Nitro GA1 hadir dengan desain hemat ruang menawarkan dua ukuran layar yakni 31,5 inci dan 27 inci agar mudah disesuaikan dengan kebutuhan setup di rumah.

Dalam keterangan pers Acer, Rabu, monitor ini dirancang untuk memenuhi bermacam kebutuhan digital mulai dari pusat hiburan untuk streaming konten, bermain gim, hingga mengerjakan tugas sehari-hari.

Kedua monitor pintar terbaru itu juga telah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih mulai dari proyeksi nirkabel, tampilan simultan dari berbagai sumber melalui Multiview, dan banyak lagi.

Untuk seri Acer DA1, monitor ini hadir dengan panel layar LED terdiri atas DA271K dan DA321QK hadir dengan resolusi 4K UHD.

Sedangkan untuk seri Nitro GA1 terdiri atas Nitro GA271U P dan Nitro GA321QU P yang dilengkapi dengan resolusi WQHD dan refresh rate hingga 180 Hz, untuk tampilan yang lebih halus dan pengalaman bermain gim yang luar biasa.

Seri Nitro GA1 turut dilengkapi dengan fitur HDR10, kecerahan 250 nits, gambar dan warna yang dibuat ulang menjadi lebih imersif dan realistis, serta kompatibel dengan AMD FreeSync dan NVIDIA G-SYNC, sehingga membantu meminimalkan

tearing pada layar ketika memutar atau menonton video.

Latensi ultra-rendah juga memberikan respons time yang cepat untuk membantu meminimalkan jeda input, sehingga berbagai konten yang bergerak cepat dapat muncul di layar dengan lancar tanpa buram.

Kedua seri itu dipastikan sudah dilengkapi dengan akses ke aplikasi-aplikasi hiburan ternama seperti Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, dan YouTube dari satu layar.

Untuk kemudahan akses pintar, monitor ini dapat diatur menggunakan aplikasi Google TV yang juga menjadi akses untuk film hingga beragam konten menarik lainnya.

Pengguna yang menyukai integrasi antar perangkat juga bisa memanfaatkan Google Cast yang mampu menghubungkan gawainya baik ponsel pintar maupun tablet ke monitor untuk lebih mudah memutar

film, mencari acara, membuka galeri foto, dan lainnya.

Selain itu, hadirnya teknologi proyeksi nirkabel dan teknologi screen mirroring pada monitor-monitor ini juga menghilangkan kebutuhan banyak kabel sehingga tampilan bisa lebih luas.

Kemampuan koneksi Bluetooth memudahkan untuk menghubungkan monitor ini dengan perangkat lain seperti speaker dan periferal.

Sebagai produk IoT, monitor juga dapat dihubungkan ke jaringan Wi-Fi dan terintegrasi secara mulus dengan ekosistem perangkat pintar di sekitarnya.

Monitor pintar Acer DA1 dan Nitro GA1 dilengkapi dengan fungsi Multiview yang membagi layar menjadi beberapa bagian.

Hal ini berguna bagi mereka yang

melakukan pekerjaan lebih dari satu karena pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan konten dari berbagai sumber secara bersamaan dan mengontrolnya langsung dari layar.

Pengguna dapat memasang webcam eksternal untuk panggilan video dan streaming, sehingga memungkinkan para streamer untuk memilih platform yang mereka sukai untuk mengunggah video secara langsung melalui monitor.

Bagian stand-nya dirancang secara ergonomis untuk memudahkan pengguna menentukan posisi yang ideal dan dapat dipasang di dinding dengan dukungan VESA, sehingga memungkinkan lebih banyak ruang di meja. (Antara)



Acer DA 1



Nitro Ga1



MENJALANI MASA TUA TANPA DEMENSIA

PENYAKIT Alzheimer adalah kondisi otak degeneratif yang menyebabkan penurunan progresif dalam sejumlah aspek. Mulai dari ingatan, kognitif atau kemampuan berpikir, kemampuan bicara dan perilaku.

Penyakit ini dapat menasar orang dewasa yang masih muda. Namun, sebagian besar kasusnya terjadi pada mereka yang berusia lebih dari 60 tahun (lansia).

Pada tahap awal, pengidapnya akan mengalami gangguan daya ingat bersifat ringan. Contohnya seperti mengalami kesulitan mengingat nama benda, percakapan dengan siapa saja hingga peristiwa yang belum lama terjadi.

Penyakit ini dapat memburuk seiring waktu sehingga membuat pengidapnya tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan, pada kasus yang sudah parah, penyakit Alzheimer dapat membuat pengidapnya linglung.

Penyakit Alzheimer terjadi saat protein otak gagal berfungsi secara normal sehingga mengganggu kinerja sel otak (neuron). Ketika neuron rusak, sel otak kehilangan koneksi satu sama lain hingga akhirnya mati.

Ketika usia terus bertambah tanda penuaan akan terlihat jelas di kulit

berupa keriput. Nyatanya, bukan cuma kulit yang mengkerut tetapi otak kita pun akan mengecil dan menyebabkan penurunan fungsi yang disebut dengan demensia.

Otak yang mengalami penurunan volume atau ukuran secara berlebihan akan meningkatkan risiko perkembangan demensia (kepikunan).

Kondisi ini terjadi karena faktor penuaan, terjadi secara lambat dan tidak bisa dikembalikan menjadi normal.

Dijelaskan oleh Dr.dr.Gea Pandhita Sp.N, walau kita tidak bisa mencegah proses pengerutan otak, tetapi fungsinya bisa tetap dijaga agar tidak teralutur.

"Penurunan fungsi otak ini ada yang berjalan lambat ada yang cepat. Itu sebabnya tidak semua orang lanjut usia akan mengalami Alzheimer. Penurunan yang berlebihan merupakan kondisi pra demensia," papar dr.Gea dalam acara media diskusi yang digelar oleh RS.Pondok Indah Jakarta (13/6/2024).

Ada beberapa jenis demensia, namun yang paling banyak adalah Alzheimer. Kondisi ini mayoritas dialami oleh orang berusia di atas 65 tahun.

Penderita Alzheimer akan

mengalami penurunan fungsi kognitif yang meliputi sulit mengingat, menurunnya kemampuan berbahasa, hingga pengambilan keputusan. Mereka juga kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan seperti tiba-tiba lupa menyalakan kompor.

"Jika ada dua gejala tersebut waspadai Alzheimer, apalagi kalau ditambah dengan gangguan perilaku dan emosional, misalnya jadi gampang curiga atau tersinggung," papar dr.Gea.

Mencegah Demensia Alzheimer

Untuk memperlambat penurunan fungsi otak, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, mulai dari melakukan deteksi dini kesehatan otak.

Pemeriksaan ada tidaknya demensia bisa dilakukan dengan pengisian kuesioner terstandar yaitu Mini Mental State Examination (MMSE) yang memiliki 11 item penilaian.

Ada pula pemeriksaan fisik berupa MRI untuk mengetahui volume area otak hipocampus dan pembuluh darah otak.

Pemeriksaan yang lebih mendalam termasuk PET/Scan untuk melihat apakah ada deposit plak di sel otak

yang jadi penyebab demensia. Jika ada gejala demensia, dokter akan memberikan obat untuk memperlambat pengecilan volume otak.

Menurut dr.Gea, kita bisa menekan risiko demensia Alzheimer dengan mengendalikan penyakit yang mengganggu aliran darah ke otak seperti hipertensi, diabetes, atau obesitas.

"Tingkatkan aktivitas yang bisa menstimulasi otak, seperti membaca, mengisi TTS, mengaji bagi yang muslim, hingga belajar hal baru agar otak terus dipakai," paparnya.

Rutin berolahraga 30 menit setiap hari juga disarankan karena akan meningkatkan aliran darah ke otak. Tak kalah penting adalah tidur cukup dan berkualitas setiap malam.

"Saat kita tidur malam, tubuh akan memproduksi hormon melatonin yang fungsinya adalah memperbaiki sel-sel, termasuk sel otak. Hormon ini produksinya sangat tinggi pada jam 9 malam sampai jam 3 pagi," katanya.

Dengan menjalani gaya hidup sehat ini, termasuk memperhatikan pola makan, kita bisa memperlambat terjadinya penurunan fungsi otak sehingga masa tua dapat dijalani dengan lebih berkualitas (Kompas/halodoc)



"Penurunan fungsi otak ini ada yang berjalan lambat ada yang cepat. Itu sebabnya tidak semua orang lanjut usia akan mengalami Alzheimer. Penurunan yang berlebihan merupakan kondisi pra demensia,"

Dr.dr.Gea Pandhita Sp.N

Berkelit-kelit ... (dari Hal 1)

TIGA menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait hebohnya rencana pemberian bantuan sosial atau bansos bagi pelaku judi online. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, dirinya mengikuti pendapat publik.

"Iya kalau itu saya ikuti pendapat publik saja," ujar Menteri Ida saat ditemui se usai Salat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Senin, (17/6/2024).

Menurut dia, di satu sisi mereka memang bisa jatuh miskin yang tentunya berhak mendapat bansos. Namun, di sisi lain ada pendapat masyarakat bahwa pelaku judi online lalu mendapat uang dan menjadi 'tuman' alias gemar karena kebiasaan mendapat enak.

"Saya kira itu ranahnya Kementerian Sosial (Kemensos) menghitung manfaat dan mudaratnya," kata Ida.

Ida menegaskan, pihaknya bersikap terbuka saja ketika pelaku judi online dinilai sangat membutuhkan uang lantaran merugi.

"Sebenarnya masyarakat bisa menilai siapa saja yang membutuhkan. Apakah (pekerja) yang menjadi pelaku dan korban judi online atau lain. Kami sangat terbuka," ujarnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian bansos untuk judi online tidak ada dalam anggaran maupun rencana anggaran pemerintah.

"Judi online enggak ada dalam anggaran yang sekarang," ujarnya setelah menjalankan salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Senin (17/6/2024).

Airlangga mengatakan belum ada koordinasi dengan Kementerian Koordinator PMK yang mengusulkan hal tersebut.

"Kalau ada usulan program silakan dibahas dengan kementerian teknis," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa praktik judi baik secara langsung maupun daring dapat memiskinkan masyarakat, sehingga kalangan tersebut kini berada di bawah tanggung jawab kementerian yang ia pimpin.

Para pemain judi online dapat dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos.

Muhadjir kemudian menegaskan, mereka yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi daring bukan pelaku, akan tetapi pihak keluarga.

"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," katanya setelah Shalat Idul Adha di halaman Kantor

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin, (17/6/2024).

Ia menjelaskan hal tersebut sebagai klarifikasi informasi yang beredar beberapa hari terakhir di berbagai kanal media sosial terkait dengan gagasan Kemenko PMK untuk pemberian bansos korban judi daring.

Dia menjelaskan, gagasan pemberian bansos terhadap korban judi daring tersebut menjadi salah satu materi yang diusulkan Kemenko PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online.

Menko PMK berkapasitas sebagai Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai ketua dalam struktur tim ad hoc tersebut.

Pembentukan satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

Muhadjir menilai bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi daring. Hal demikian dikarenakan keluarga, khususnya anak dan istri, bukan hanya mengalami kerugian secara materi tetapi juga kesehatan mental, bahkan sampai berujung kematian, sebagaimana terjadi dalam banyak kasus.

"Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK. Dalam mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online ini akan kami bahas dengan Menteri Sosial," kata dia.

Gelombang Penolakan

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gurnadi Ridwan sebelumnya mengatakan, gagasan pemberian bansos untuk pelaku judi online perlu ditolak. Karena menurutnya, bisa memicu kecemburuan dan bertambahnya pelaku judi online baru khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tidak mendapatkan bansos.

Verifikasi kriteria penerima bansos dirasa akan sulit secara teknis dan berpeluang salah sasaran, bahkan bisa saja digunakan untuk menjadi modal berjudi kembali. Penambahan kuota bansos akibat masuknya kriteria korban judi online dianggap akan memicu pembengkakan anggaran. Alokasi anggaran untuk bansos pada 2024 saja sudah mencapai Rp152,30 triliun.

"Tentu akan memicu pembengkakan anggaran dan berpotensi memakan alokasi layanan publik lainnya seperti kesehatan dan pembangunan," ujar Gurnadi.

Senada, Pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Dewi Rahmawati Nur

Aulia menegaskan peningkatan kesadaran bahaya judi online jauh lebih penting untuk digencarkan oleh pemerintah ketimbang mempertimbangkan memasukkan korban judi online ke dalam daftar penerima dana bansos.

"Menurut saya, kita harus menasar pada akar masalah kita, yang artinya harus ditingkatkan kesadaran tentang bahayanya perjudian ini, entah itu secara finansial, bagaimana hukumnya, yang tentunya juga melibatkan para penegak hukum termasuk pemuka agama," kata Dewi.

Dia menyebutkan, masyarakat yang terjatuh dalam judi online lebih dari setengahnya merupakan kelompok dengan penghasilan yang cukup, bahkan beberapa korban merupakan kalangan dengan upah lebih tinggi dari upah minimum.

Selain itu, ia juga menilai kondisi korban yang menjadi miskin akibat terjatuh judi online dilakukan secara sadar sejak semula dan atas keputusan pribadi, bukan diakibatkan karena kemiskinan struktural.

Oleh karena itu, Dewi menyimpulkan tidak tepat terkait wacana mengikutsertakan korban judi online sebagai penerima manfaat dana bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Ia pun mengingatkan bahwa ketentuan penerima dana bansos sudah diatur dalam undang-undang, yakni masyarakat miskin, mulai dari yang berstatus hidup tidak layak hingga menjalani pengupahan di bawah upah minimum. Sedangkan para korban judi online melakukan aktivitas nirmanfaat itu atas kemauan mereka sendiri, hingga kemudian kehilangan harta dan mungkin terjatuh utang.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, 14 Juni 2024.

Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie sebagai Ketua Harian Pencegahan, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menyatakan bahwa korban judi online tidak secara otomatis berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Menurutnya, korban judi online yang berhak menerima bansos adalah mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Artinya, data DTKS memiliki parameter pengukuran kemiskinan. Nah, kemudian, mereka akan dimasukkan ke dalam sistem DTKS apakah masuk atau tidak," jelasnya seperti dikutip Senin (17/6/2024).

Diah menegaskan hal ini sebagai respons terhadap wacana untuk memasukkan korban judi online sebagai penerima manfaat dana bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

"Silakan saja korban judi online apakah masuk atau tidak, silakan masuk ke dalam proses verifikasi DTKS. Misalnya, jika seseorang jatuh miskin dan membutuhkan bantuan, maka masuk dalam kriteria kemiskinan itu adalah hal lain. Namun, variabel kalah judi online tidak menentukan masuk DTKS, tidak bisa," tegasnya.

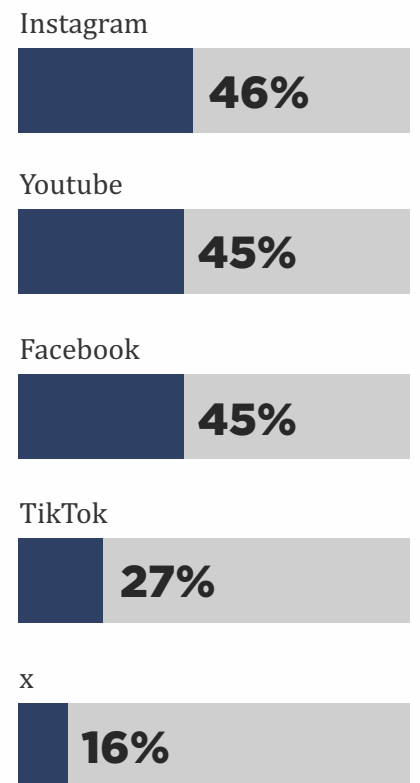
Selanjutnya, Diah menilai bahwa lebih penting untuk mengatasi permasalahan judi online daripada memberikan bantuan sosial. Menurutnya, yang terpenting adalah mengatasi sumber masalah judi online.

"Karena banyak orang yang tertipu, banyak masalah kriminal. Jadi yang paling penting adalah mengatasi judi online itu sendiri, mengatasi sumbernya," ujarnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat aktivitas judi online mendominasi transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi mencurigakan judi online itu jumlahnya melebihi transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari kasus korupsi. (wid,rls,ant,ist/dya)



**IKLAN JUDI ONLINE
DI SOSIAL MEDIA**



Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang Israel

YERUSALEM-Seorang pejabat Israel mengumumkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang yang beranggotakan enam orang. Dikutip dari Reuters, Senin (17/6/2024) keputusan itu merupakan langkah yang sudah ditebak setelah Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mundur.

Meski demikian, pasukan Israel pada Senin (17/6/2024), masih menyerang wilayah Gaza selatan pada saat banyak umat Islam memperingati Iduladha. Pejabat Palestina di Kota Rafah di bagian paling selatan Gaza melaporkan, masih terjadi penembakan tank, sebelum dimulainya jeda taktis untuk masuknya bantuan.

Jeda taktis yang diumumkan militer Israel pada akhir pekan, berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 19.00 waktu setempat setiap hari hingga pemberitahuan lebih lanjut. Jeda taktis ini berlangsung di sepanjang jalan yang mengarah dari penyeberangan Kerem Shalom ke Salah Al-Din.

Tujuan jeda taktis untuk memberi kesempatan masuknya bantuan kemanusiaan yang lebih banyak ke warga sipil Gaza. PBB telah memperingatkan, lebih dari sejuta warga di Gaza berada di ambang kelaparan massal.

Sementara itu, seorang juru bicara militer Israel yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, tidak ada perubahan dalam kebijakan di perang Gaza. Ia menekankan bahwa pertempuran berlanjut sesuai rencana.

Netanyahu kini diperkirakan akan mengadakan konsultasi mengenai perang di Gaza dengan sekelompok kecil menteri, termasuk Menteri



Pengunjuk rasa anti-pemerintah dari kalangan warga, aktivis hingga siswa memblokir jalan-jalan di Israel, Senin (17/6/2024) mendesak PM Israel Benjamin Netanyahu mundur. (AFP)

Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer yang pernah berada di kabinet perang.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang merupakan mitra nasionalis-agama dalam koalisi, menuntut Netanyahu agar bisa dilibatkan dalam kabinet perang. Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan dengan mitra internasional termasuk Amerika Serikat.

Forum tersebut dibentuk setelah Gantz bergabung dengan Netanyahu dalam pemerintahan persatuan nasional pada awal perang pada Oktober 2023 dan juga menyertakan mitra Gantz, Gadi Eisenkot dan Aryeh Deri, ketua partai keagamaan Shas sebagai pengamat.

Gantz dan Eisenkot meninggalkan pemerintahan pekan lalu setelah menyatakan kegagalan Netanyahu dalam menyusun strategi perang di Gaza.

Demo Anti-pemerintah Menguat

Di sisi lain, pengunjuk rasa anti-pemerintah memblokir jalan-jalan di Israel, Senin (17/6/2024). Mereka berasal dari para aktivis dan siswa sekolah menengah yang telah melakukan protes mingguan, yang menyerukan percepatan pemilu.

Dilansir dari Al Jazeera, pengunjuk rasa memblokir beberapa jalan raya dan persimpangan di Israel. Ini termasuk Highway 1, jalan utama yang menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv.

Siswa sekolah menengah juga

melakukan aksi mogok sebagai bagian dari protes ini. Kedua kelompok tersebut akan berkumpul di Knesset untuk meneruskan unjuk rasa.

Setelah itu mereka berbaris menuju kediaman Perdana Menteri Netanyahu. Mereka meminta Netanyahu segera menanggalkan jabatannya dengan menggelar pemilu.

Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan warga Israel yang mengungsi akibat serangan Hizbullah akan kembali ke rumah mereka sesegera mungkin.

Ia memperingatkan Israel berada di ambang eskalasi yang lebih luas di tengah meningkatnya agresi dari Hizbullah. "Hizbullah membahayakan masa depan Libanon, sehingga dapat bertindak sebagai tameng bagi Hamas," kata Hagari.

Dia menambahkan Hizbullah telah menembakkan lebih dari 5.000 roket, rudal anti-tank, dan drone bersenjata dari Libanon ke arah Israel, sejak Oktober. Terlepas dari peringatannya, Hagari mengatakan Israel akan memastikan warga Israel yang mengungsi dari Israel utara akan kembali ke rumah mereka dengan selamat.

Puluhan ribu warga Israel telah tinggal di kamar hotel yang didanai pemerintah selama berbulan-bulan setelah mengungsi dari rumah mereka di dekat perbatasan selatan Israel dengan Gaza dan perbatasan utara dengan Israel.

Pemerintah Israel mengatakan pihaknya telah memperpanjang masa menginap hotel bagi para pengungsi Israel dari daerah yang berbatasan dengan Gaza hingga 15 Agustus. (afp,reuters,aljazeera,wid/dya)

PROYEKSI PREVALENSI MALNUTRISI AKUT DI JALUR GAZA DALAM TIGA SKENARIO (FEBRUARI-AGUSTUS 2024)

Sumber: riset Crisis in Gaza:
Scenario-based Health Impact Projections

